



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 13(2), 165-186



RESEARCH ARTICLE

ARAB SPRING: GEJOLAK REVOLUSI DI LIBYA (2011-2014)

Afiq Galih Pratama, Murdiyah Winarti, Yeni Kurniawati

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia

afiqgalihp@gmail.com

To cite this article: Pratama, A.F., Winarti, M., & Kurniawati, Y.. (2024). Arab spring: gejolak revolusi di libya (2011-2014). *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 13(2), 165-186. <https://doi.org/10.17509/factum.v13i2.28889>.

Abstract

This article generally discusses the Arab Spring events that took place in Libya in 2011. From this general discussion, the discussion then elaborates on several issues, namely the living conditions of Libya before the revolution, the role of youth and social media in the revolutionary movement, the process of the revolution and the impact of revolution to social and political life in Libya. This research uses historical research methods or historical methods which include the heuristic process, criticism, interpretation, and historiography. Based on the research results, it is concluded that the conditions of social and political life during Gaddafi's reign influenced the emergence of the revolutionary movement in 2011. Youth and social media have a vital and effective role to play in pursuing the revolutionary movement in Libya. The revolutionary process carried out by the people, led to civil war in Libya, namely between the opposition and the pro Gaddafi camp. The impact of the revolution on socio-political life is that there is a life that is more democratic than before, but there are new problems related to security and unity in Libya.

Abstrak

Artikel ini secara umum membahas mengenai peristiwa *Arab Spring* yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Dari pembahasan umum tersebut kemudian pembahasan diuraikan pada beberapa permasalahan yaitu tentang kondisi kehidupan Libya sebelum revolusi, peranan pemuda dan media sosial dalam gerakan revolusi, proses terjadinya revolusi serta dampak dari revolusi terhadap kehidupan sosial dan politik di Libya. penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah atau metode Historis yang meliputi proses heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa kondisi kehidupan sosial dan politik pada masa pemerintahan Khadafi mempengaruhi kemunculan gerakan revolusi tahun 2011. Pemuda dan media sosial memiliki peran yang vital dan efektif dalam mengupayakan gerakan revolusi di Libya. Proses revolusi yang dilakukan rakyat, menimbulkan perang saudara di Libya yaitu antara kubu oposisi dan kubu pro Khadafi. Dampak dari revolusi terhadap kehidupan sosial politik adalah adanya kehidupan yang lebih demokratis dibandingkan sebelumnya, namun terdapat masalah-masalah baru yang berkaitan dengan keamanan dan persatuan di Libya

© 2024 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

Article Info

Article History:

Submitted/Received 01 Oct. 2020
First Revised 30 January 2024
Accepted 01 Sept 2024
First Available online 30 Oct 2024
Publication 30 Oct 2024

Keyword:

Arab Spring
Demokrasi
Libya Revolution

PENDAHULUAN

Pergolakan di Timur Tengah yang terjadi pada tahun 2011 tersebut mendapat julukan *Arab Spring* (Musim Semi Arab) yang dapat diartikan sebagai kebangkitan Negara Arab. Meskipun tidak semua negara Arab pada saat itu mengalami revolusi, namun istilah tersebut menggambarkan negara Arab yang dianalogikan sebagai bunga yang tengah mekar setelah sebelumnya negara-negara tersebut berada dibawah pemerintahan otoriter. Gejolak *Arab Spring* merupakan sebuah peristiwa yang bermula dari Tunisia yaitu ketika seorang pemuda berusia 26 tahun bernama Mohammed Bouazizi, melakukan protes terhadap perilaku sewenang-wenang aparat dan acuhnya pemerintahan lokal terhadap aspirasi rakyat di bawah rezim otoriter Ben Ali. Bouazizi melakukan aksi bakar diri yang kemudian menarik perhatian negara bahkan dunia, pada tanggal 17 Desember 2010 (Sahide, 2015, hlm 120).

Terjadi protes besar di Tunisia, Ben Ali yang dikenal sebagai pemimpin otoriter dan telah berkuasa selama 24 tahun, dituntut untuk turun dari jabatannya. Selanjutnya gejolak protes bergulir ke mesir dimana perlawanan rakyat Mesir berhasil menggulingkan rezim Mubarak yang telah berkuasa di Mesir selama kurang lebih 32 tahun. Setelah Tunisia dan Mesir, gerakan revolusi berlanjut melanda negara Libya. Rakyat Libya menuntut mundurnya Muammar Khadafi yang telah menjadi pemimpin Libya selama 42 tahun (Tamburaka, 2011, hlm. 9).

Peristiwa "Revolusi" dengan gerakan massa yang menuntut mundurnya rezim-rezim otoriter ini merupakan sebuah fenomena baru dalam dunia politik di Timur Tengah. Fenomena penting yang meliputi tumbangnya rezim otoriter di beberpa negara seperti Ben di Tunisia, Husni Mubarak di Mesir dan Muammar Khadafi di Libya membuat sebuah perubahan suasana politik (Kartini dkk, 2016, hlm 145). Gerakan revolusi tersebut mengarah kepada gelombang demokratisasi yang sebelumnya

tidak terprediksi. Penyebab terjadinya revolusi tersebut menjadi pertanyaan, apakah revolusi tersebut hanya efek domino revolusi dari satu negara ke negara lainnya yang disebabkan murni keinginan rakyat atau ada sebuah kepentingan lain dibaliknya. Meski demikian terdapat banyak kesamaan kondisi negara yang melatari munculnya revolusi yaitu kondisi sosial politik dan ekonomi yang berlangsung di negara-negara Arab terutama Tunisia, Mesir dan Libya sebelum terjadinya gejolak revolusi tersebut (Sahide, 2015, hlm.128).

Gerakan sosial merupakan upaya untuk mencapai sebuah kepentingan bersama atau kolektif. Kelompok tersebut biasanya melakukan sebuah tindakan perlawanan atau protes terhadap pemegang kebijakan. Adapaun gerakan sosial baru (*new social movement*) yang berkembang pada akhir abad dua puluh sebagai sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa aksi perlawanan juga dapat dilakukan kelompok terpelajar dalam masyarakat (Setiadi, & Kolip, 2013, hlm. 218).

Touraine dalam mengatakan bahwa aksi yang dilakukan individu-individu dalam bentuk gerakan sosial merupakan suatu upaya untuk memproduksi dan mentransformasi sebuah struktur dan tatanan sosial yang ada. Aksi dalam gerakan sosial ini dapat dilihat sebagai tindakan yang normal menuju pada suatu perubahan yang diharapkan oleh masyarakat (Rusmanto, 2012, hlm 55). Masyarakat Libya mengaharapkan terjadinya perubahan dalam struktur sosial dan politik karena selama ini masyarakat sangat dibatasi dalam keikutsertaan atau partisipasi terhadap pemerintahan ditambah banyak pelanggaran pelanggaran yang terjadi membuat rakyat melakukan demonstrasi anti pemerintah sebagai ekpresi kekecewaan atas kondisi negaranya dan sebagai bentuk perlawanan.

Pemberontakan Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2010 hingga 2011 telah mengakibatkan penggulingan pemimpin di Tunisia dan Mesir dengan jangka waktu yang berdekatan serta pola-pola protes awal

dan tuntutan yang serupa. Media sosial telah memainkan peran penting dalam mengorganisir oposisi (Garland, 2012, hlm. 4). Dalam gejolak revolusi, Penggunaan media sosial ini bertujuan untuk mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat seperti halnya yang terjadi di Mesir dan Tunisia. Begitupun di Libya terbentuknya jaringan yang menghubungkan Libya dengan dunia luar, hal tersebut bertujuan untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi dari tempat kejadian kepada dunia melalui internet (Agastya, 2013, hlm 109). Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam melakukan aksi protes menjadi pertanyaan seberapa besar pengaruh yang diberikan media sosial dalam aksi protes menghadapi pemerintahan otoriter pada revolusi Libya 2011.

Libya dipimpin Khadafi dengan pemerintahan yang kokoh dan memiliki gaya otoriter nampaknya tidak dapat menghindari gejolak revolusi yang melanda kawasan Afrika Utara. Selain momentum rangkaian revolusi di Negara-negara tetangga, tentu terdapat sebuah kondisi sebelum terjadinya revolusi yang mendukung keinginan rakyat untuk melakukan perubahan. Peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana kondisi yang menyebabkan terjadinya revolusi. Muncul pertanyaan dari peristiwa revolusi Libya 2011 tentang siapa yang berperan dan upaya seperti apa yang dilakukan dalam gerakan revolusi tersebut. Peristiwa revolusi yang terjadi di Libya pada tahun 2011 menarik peneliti karena dalam proses revolusi yang ditempuh, terjadi sebuah konflik bersenjata atau lebih tepatnya perang saudara yang menyebabkan korban jiwa.

Ralf Dahrendorf memandang masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang terdiri dari kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dimana terdapat suatu usaha untuk menaklukkan atau mempengaruhi komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya (Nazir, 2008, hlm. 174). Orang atau

kelompok yang berada dalam posisi dominan memiliki upaya untuk mempertahankan status quo, sedangkan orang yang berada pada subordinate berupaya melakukan perubahan (Ritzer, 2010, hlm. 154). Konflik kepentingan selalu ada sepanjang waktu, walaupun tersembunyi atau laten. Konflik kepentingan tak selalu harus disadari oleh pihak subordinat dan superordinat dalam melakukan aksi. Kepentingan adalah obyektif dalam arti kepentingan itu tercermin dalam harapan (peran) yang diletakan pada posisi. Terdapat juga harapan yang tak disadari disebut sebagai kepentingan tersembunyi. Kepentingan nyata adalah kepentingan tersembunyi yang telah diasadari (Ritzer, 2010, hlm. 154).

Dalam meredam aksi demonstrasi yang dimulai pada tanggal 17 Februari 2011, aparat rezim Khadafi menggunakan kekerasan untuk membubarkan massa. Tindakan penanggulangan masa dengan cara brutal oleh Khadafi mendapat kecaman serius baik dari internal pemerintahan hingga dunia internasional. Pejabat tinggi dan militer banyak yang mengundurkan diri dari pemerintahan sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan yang dilakukan Khadafi (Tamburaka, 2009, hlm. 63). Hal tersebut menjadi rintangan baru karena memunculkan kelompok pro dan kontra perubahan.

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu: Pertama, mendeskripsikan kondisi kehidupan sosial dan politik di Libya sebelum terjadinya revolusi. Kedua, menjelaskan peranan pemuda dan media sosial dalam gerakan revolusi di Libya pada tahun 2011. Ketiga, Mendeskripsikan proses terjadinya revolusi di Libya pada tahun 2011. Keempat, Menjelaskan dampak revolusi terhadap kehidupan sosial dan politik Libya.

Revolusi yang terjadi di Libya pada tahun 2011 merupakan sebuah tindakan lanjutan dari gerakan sosial dimana rakyat Libya melakukan demonstrasi sebagai bentuk kekecewaan dan menuntut perubahan diberbagai aspek kehidupan masyarakat. Namun hal tersebut

mendapat respon represif dari rezim khadafi sebagai pemegang kewenangan yang berupaya mempertahankan status quo dan berujung pada perang saudara. Dua kelompok yang terbentuk, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Rakyat Libya menginginkan perubahan struktur melalui pemerintahan yang lebih demokratis dengan mengupayakan perubahan meskipun dengan jalan kekerasan, Sedangkan rezim Khadafi memiliki kepentingan untuk mempertahankan kekuasaannya sebagai pemegang pemerintahan Libya meskipun harus memerangi rakyatnya sendiri, sehingga pada akhirnya revolusi yang berlangsung harus melalui tindakan kekerasan dengan terjadinya konflik perang saudara tahun 2011.

Dari peristiwa tersebut peneliti juga tertarik dengan bagaimana dampak yang diberikan oleh revolusi tahun 2011 tersebut terhadap kondisi kehidupan sosial dan politik Libya. Apakah perubahan yang diharapkan oleh rakyat akan terwujud atau sebaliknya.

METODE

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode sejarah atau metode historis yang merupakan sebuah prosedur atau langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian sejarah guna merekonstruksi peristiwa-peristiwa masa lalu berdasarkan analisis sumber-sumber atau bukti-bukti sejarah. Metode sejarah memiliki beberapa tahapan proses penelitian, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Heuristik merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah atau evidensi sejarah yang sesuai dengan kajian yang diteliti (Syamsudin, 2012, hlm 67). Sumber sejarah dapat disebut juga dengan data sejarah (dalam bahasa inggris *datum* bentuk tunggal, sedangkan data bentuk jamak, bahasa latin *datum* berarti pemberian). Pengumpulan sumber sejarah harus sesuai dengan kajian sejarah yang akan ditulis (Kuntowijoyo, 2005, hlm 95). Heuristik

merupakan tahapan pertama yaitu pencarian dan pengumpulan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Pada tahap ini, kegiatan diarahkan pada pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang akan diteliti, baik yang terdapat dilokasi penelitian, perpustakaan, arsip, temuan benda maupun sumber lisan. Dalam proses pencarian dan pengumpulan sumber, peneliti mengunjungi beberapa perpustakaan dan toko buku untuk mencari informasi dan mengumpulkan sumber yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi. Sumber-sumber yang diperoleh berupa buku, artikel jurnal, laporan-laporan lembaga, media massa cetak maupun online.

Kedua, Kritik yaitu tahap meneliti dan menyeleksi sumber – sumber sejarah yang di dapat secara kritis supaya mendapat kebenaran dari sumber dan mencegah fakta-fakta yang tidak benar. Dalam rekonstruksi imajinatif peristiwa sejarah dibuat gambaran yang terdiri dari anggapan-anggapan mengenai gejala-gejala yang didapat dari evidensi-evidensi yang ditemukan dalam sumber sejarah. Data yang terdapat dalam evidensi-evidensi itu harus diuji secara kritis kebenarannya (Ismaun, 2016, hlm 60).

Peneliti melakukan kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah cara melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek “luar” dari sumber sejarah (Sjamsuddin, 2012, hlm 104). Kritik internal sebagaimana yang di sarankan oleh istilahnya menekankan aspek “dalam” yaitu isi dari sumber: kesaksian (testimoni). Setelah fakta kesaksian (*fact of testimony*) ditegakan melalui kritik eksternal, tiba giliran sejarawan untuk mengadakan evaluasi terhadap kesaksian itu (Sjamsuddin, 2012, hlm 112). Dalam tahap ini peneliti melakukan kritik apakah sumber tentang keaslian, seberapa besar sumber tersebut dapat dipercaya dan memutuskan apakah sumber yang ada tersebut dapat digunakan atau tidak dalam penelitian.

Ketiga, Interpretasi yaitu menafsirkan keterangan-keterangan sumber secara

logis dan rasional dari fakta dan data yang telah terkumpul dengan cara dihubungkan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Dalam penulisan sejarah, digunakan secara bersamaan tiga bentuk teknik dasar tulis menulis yaitu dekripsi, narasi dan analisis. Sejarawan yang berorientasi pada sumber – sumber sejarah saja, akan menggunakan porsi deskripsi dan narasi yang lebih banyak sedangkan sejarawan yang berorientasi pada problem, selain menggunakan deskripsi dan narasi, akan lebih mengutamakan analisis (Sjamsuddin, 2012, hlm 123). Kuntowijoyo mengatakan bahwa dalam interpretasi sejarah atau analisis sejarah terdapat ada dua metode yang dapat digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis memiliki arti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan (Abdurahman, 2007, hlm 73). Pada tahap ketiga ini yaitu interpretasi, penulis dapat memberikan arah dan pandangan terhadap penelitian, karena dalam tahap ini dilakukan pemberian nilai atau makna terhadap sumber yang sudah didapat dan melalui tahap kritik sumber.

Keempat, Ketika sejarawan memasuki tahap menulis, maka sejarawan mengerahkan seluruh daya pikirannya, bukan saja keterampilan teknis penggunaan pikiran-pikiran kritis dan analisisnya karena ia pada akhirnya harus menghasilkan suatu sintesis dari seluruh hasil penelitiannya atau penemuannya itu dalam suatu penulisan utuh yang di sebut Historiografi (Sjamsuddin, 2012, hlm 121). Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian yang merupakan hasil dari langkah-langkah yang telah dilakukan mulai dari pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, serta interpretasi. Fakta- fakta yang telah diinterpretasikan, selanjutnya disusun untuk mengungkapkan peristiwa sejarah yang menjadi topik dalam penelitian secara kronologis dan menjelaskan makna yang terkandung didalamnya.

PEMBAHASAN

Kondisi kehidupan sosial dan politik masa pemerintahan Khadafi di Libya

Kondisi Sosial

Libya merupakan sebuah negara di kawasan Afrika Utara. “Libya” berasal dari bahasa mesir yang memiliki arti yaitu lebu, sebutan tersebut diperuntukkan bagi orang-orang Berber yang tinggal di sebelah barat Sungai Nil. Istilah tersebut kemudian diadopsi oleh bahasa Yunani sebagai “Libya”. Pada masa Yunani Kuno, Istilah “Libya” ini memiliki arti yang lebih luas yaitu mencakup seluruh Afrika Utara yang berada di sebelah barat Mesir. Adapun bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab (Agastya, 2013, hlm 88).

Khadafi berpengaruh sejak kenaikannya menjadi pemimpin Libya pada tahun 1969. Menetapkan beberapa kebijakan salahsatunya yaitu untuk mengorganisir peranan suku dalam pemerintahan. Wilayah administratif yang berlaku tidak lagi mengikuti garis batas suku seperti yang berlaku saat berada dibawah kekuasaan Raja Idris al-Sanusi. Maka dari itu kekuatan atau pengaruh suku dihimpun secara adil dalam sebuah komite untuk membangun sebuah relasi yang baik antara suku dengan pemerintahan. Pemerintah Khadafi memiliki keinginan untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan suku-suku yang ada di Libya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perpecahan antar suku dan mendukung kekuatan politik pemerintah sehingga dapat menjaga persatuan serta keamanan Libya (Schnelzer, 2016, hlm 46).

Namun seiring berjalannya waktu, Khadafi menempatkan sukunya sendiri yaitu Qadadfa untuk menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan Libya terutama dalam posisi-posisi politik dan militer, meskipun sebagian orang secara formal tidak memiliki jabatan. Khadafi juga membangun aliansi dengan suku Warfalla yang berbasis di Tripolitania dan Margharha berbasis di Fezzan untuk

memperkuat politik dan militer (Brahimi, 2011, hlm 611).

Etnis Amazigh (Berber) merupakan kaum minoritas asli terbesar di Libya. Suku Amazigh adalah penduduk asli Afrika Utara yang merupakan etnis Berber dan tergolong menjadi minoritas. keberadaannya mendapat perlakuan yang kurang baik dari rezim Khadafi. Bentuk marginalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap etnis Amazigh adalah larangan penggunaan bahasa Tamazight, larangan berpartisipasi dalam politik dan mereka hidup terasingkan di wilayah barat Libya (Schnelzer, 2016, hlm 50).

Selain marginalisasi terhadap Amazight yang merupakan etnis non Arab, terdapat etnis lain di Libya yang mendapat perlakuan serupa. Etnis Tebu sebagai minoritas non-Arab ini tinggal di Selatan Libya dan wilayah Utara Chad. Terdapat sensus pada tahun 1954 tetapi hasilnya tidak akurat dan tidak meyakinkan karena tidak semua tebu yang tinggal di Libya terdaftar dalam sensus. Pada tahun tujuh puluhan, rezim Khadafi memberikan kewarganegaraan Libya kepada 30.000 masyarakat tebu. Namun hanya duapuluh tahun kemudian, status kewarganegaraan masyarakat tebu di Libya di cabut lagi. (Schelzer, 2016, hlm 50). Dengan demikian masyarakat Tebu secara tidak langsung tidak diakui sebagai bagian dari rakyat Libya.

Muammar Khadafi yang beraliran sosialis menerapkan sistem ekonomi terpusat dan menganggap kesetaraan dalam negara merupakan hal yang penting, terutama dalam hal ekonomi, sebagaimana pandangan sosialis. Dari pemikiran tersebut Khadafi tidak membiarkan sektor swasta tumbuh, karena tidak mempercayai sistem ekonomi liberal yang ditandai dengan pemberian kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta dan pasar untuk menentukan hasil kompetensi ekonomi. Pandangan yang menempatkan pemerintah hanya sebagai pengawas, dan bukan pengontrol langsung. Khadafi tidak menyepakati hal ini bisa membawa kesejahteraan dan equity bagi

masyarakat. Meskipun pada faktanya, sistem ekonomi yang diterapkan berupa “true economic independence” dengan menasionalisasi semua aset dan menolak investasi asing, juga gagal membawa kesejahteraan yang diinginkan. (Hatimah, 2012, hlm 54).

Libya memiliki kekayaan alam berupa minyak yang melimpah, tentunya dengan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pendapatan negara yang sangat besar. Dalam pengelolaannya, Libya mendapatkan keuntungan mayoritas dari hasil produksi minyak tersebut. Sebagai negara eksportir peringkat ke 12 dunia, menjadikan Libya mempunyai peran penting bagi Eropa yang mengkonsumsi lebih dari setengah hasil dari minyak negara tersebut (Tamburaka, 2011, hlm. 222). Fakta tersebut menunjukkan bahwa Libya memiliki pemasukan besar yang berasal dari produksi minyak dan keuntungan dari produksi minyak tersebut dapat dinikmati atau memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Pembangunan fasilitas untuk menunjang kebutuhan masyarakat cukup pesat berkembang pada masa Khadafi. Pada tahun 1976, Nasionalisasi tempat tinggal yang tidak ditempati dilakukan. Dalam kebijakan ini Pemerintah menurunkan harga pembelian apartemen sebesar 30% pada akhir 1977. Selanjutnya, Pada bulan Mei 1978, terdapat sebuah kebijakan secara resmi yang mengadopsi undang-undang real estate serta secara efektif menerapkan *al-bayt li sakinihi*, dimana kebijakan tersebut memunculkan adanya pendistribusian *real estate* kepada sebagian besar masyarakat Libya yang berpenghasilan rendah. Bagi penyewa apartemen dan rumah juga hanya membayar hipotik bulanan kecil kepada pemerintah (Vandewille, 2012, hlm. 106).

Namun menjelang akhir kepemimpinannya atau lebih tepat sebelum terjadinya revolusi, terdapat beberapa masalah ekonomi yang menghampiri Libya. Meskipun Libya memiliki kekayaan alam yang sangat banyak, baik dalam

kekayaan alam yang masih terpendam ataupun yang telah di eksploitasi seperti minyak dengan angka penghasilan yang fantastis, akan tetapi berdasarkan catatan tahun 2010 dari *Economy Watch* menunjukkan bahwa angka pengangguran di Libya mencapai 30%, dengan demikian berarti terdapat 1.979.388 jiwa penduduk Libya yang merupakan pengangguran (Hatimah, 2012, hlm 54).

Kondisi kehidupan sosial ekonomi rakyat Libya diperparah dengan adanya tindakan yang merugikan rakyat. Gaya hidup mewah yang ditampilkan keluarga Khadafi, membuat kesenjangan sosial semakin jelas. Kekayaan yang dimiliki keluarga Khadafi banyak terkumpul dari keuntungan penjualan minyak Libya. Keuntungan yang masuk ke keluarga Khadafi berasal dari hasil penjualan minyak ke Italia dengan jumlah ekspor 38 persen, keuntungannya bisa mencapai 7,5 miliar dolar AS per tahun. Dari hasil tersebut diperkirakan Khadafi kekayaannya mencapai 60 miliar euro dalam rupiah senilai 729,4 triliun. Dalam versi yang lain kekayaan bisa ditaksir mencapai Rp 876,6 triliun dan itu semua tersebar diseluruh dunia dalam bentuk aset. Sementara, *Wikileaks* menyebut kekayaan Khadafi mencapai Rp 282,2 triliun (Tamburaka, 2011, hlm. 248).

Meskipun Libya tergolong sejahtera karena pendapatan minyaknya, tetap saja terdapat beberapa masalah dalam kehidupan sosial ekonomi yang memberikan ketidakpuasan dalam rakyat terutama adanya masalah korupsi yang dilakukan golongan elit dan pengangguran.

Kondisi politik

Muammar Khadafi naik menjadi pemimpin Libya setelah melakukan kudeta tidak berdarah terhadap Raja Idris Al-Sanusi pada tahun 1969. Setelah menyingkirkan kekuatan lama, Muammar Khadafi dan pengikut revolusionernya memperkenalkan sistem republik dengan nama resmi Republik Rakyat Sosialis Agung *Jamahiriyah Arab Libya* (Agastya, 2013, hlm. 96). Setelah mengambil alih pemerintahan Libya, Langkah awal

dalam revolusi yang dilakukan Khadafi adalah menyingkirkan semua ideologi dan pengaruh asing seperti kapitalisme dan komunisme. Khadafi memperkenalkan masyarakat baru berbasis prinsip sosialisme Libya dengan semboyan “Sosialisme, persatuan, dan kebebasan” (Agung, 2011, hlm. 25). Khadafi berusaha menciptakan perubahan dalam struktur masyarakat termasuk kehidupan sosial-politik dan pemerintahan Libya yang sebelumnya menganut sistem monarki, menjadi pemerintahan republik dengan berdasarkan kebebasan, sosialisme dan persatuan.

Muammar Khadafi yang merupakan pemimpin Komando Revolusioner dan berasal dari kalangan militer memiliki ideologi politiknya sendiri. Muammar Khadafi memiliki ideologi politiknya sendiri yang disebut dengan Teori Universal Ketiga. Ideologi tersebut terinspirasi oleh pemahaman sosialisme dan Islam. Khadafi secara politis mengkritik sistem parlementer demokrasi liberal karena dianggap kurangnya partisipasi politik langsung. Sehingga dengan landasan pemikiran tersebut, Khadafi menyerukan pembentukan Komite Rakyat Umum sebagai alat demokrasi langsung, bukan sistem parlementer. Semua pemikiran tersebut dituangkan kedalam *The Green Book* yang menjadi dasar konstitusi negara Libya selama masa pemerintahan Muammar Khadafi (Erdag, 2017, hlm. 24).

Setelah kenaikan Muammar Khadafi menjadi pemimpin Libya, sistem republik yang semula diperkenalkan, diubah menjadi “negara massa” atau *Jamahiriyah* pada tahun 1977. Peristiwa ini diumumkan melalui sebuah Kongres Umum Rakyat di Sabha, pada tanggal 28 Februari – 2 Maret 1977. Khadafi menyatakan pembentukan kekuatan rakyat yang dalam pelaksanaannya diwujudkan kedalam bentuk sebuah Komite Rakyat. Komite tersebut beranggotakan perwakilan atau utusan dari wilayah-wilayah yang ada di Libya. Kongres rakyat beranggotakan seluruh rakyat Libya, dengan lembaga tertinggi dalam sistem kenegaraannya adalah Kongres Rakyat Nasional. Pemberdayaan rakyat ini memiliki

tujuan untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi yang dimaksud Khadafi (Agustina dan Machmudi, 2014, hlm 8). Mekanisme birokrasi formal dalam sistem komite dimulai dari Kongres Rakyat Dasar dan Komite Rakyat yang berada di setiap wilayah desa dan kota. Lalu tahap selanjutnya naik ke Kongres Rakyat Umum dan Komite Rakyat Umum yang berada di tingkat nasional (Brahimi, 2011, hlm 607).

Kepemimpinan Revolusioner tidak dipilih dan tidak dapat diberhentikan dari jabatannya karena sebuah alasan yaitu kekuasaan mereka berdasarkan keterlibatannya dalam revolusi tahun 1969. Kedua, Sektor *Jamahirriyyah* terdiri dari Kongres Rakyat Dasar yang berada dimasing-masing 1.500 distrik kota, 32 Kongres Rakyat *Sha'biyat* atau kongres yang beranggotakan suku-suku yang ada di Libya dan Kongres Nasional Rakyat Umum atau kongres yang beranggotakan rakyat Libya secara keseluruhan. (Tamburaka, 2011, hlm. 219)

Menurut Hinz dalam Schnelzer (2016, hlm. 38) menyebutkan: "In Libya's totalitarian political system, there was no separation of the executive and the legislative powers". Dengan demikian pembagian kekuasaan dalam sistem politik totaliter yang dijalankan Khadafi terdapat ketidak jelasan dalam pemisahan lembaga yang memiliki kewenangan merancang atau membuat undang-undang, dengan lembaga eksekutif selaku pelaksanaan tugas.

Pemikiran rezim Khadafi beranggapan keberadaan partai dan organisasi masyarakat akan membawa perpecahan karena konflik kepentingan sehingga mengganggu kestabilan sebuah negara. Selain itu aksi demonstrasi dan protes di ruang publik dianggap dapat mengaggu keamanan dan ketertiban negara. Maka dari itu, Undang-undang nomor 71 tahun 1972 tentang larangan keberadaan partai politik di Libya menjadi dasar bagi pemerintah rezim Khadafi untuk melarang semua bentuk

demonstrasi. Gerakan demosntrasi dianggap menghina konstitusi Libya (Tamburaka, 2011, hlm. 219).

Rezim Khadafi mengeluarkan beberapa kebijakan politis antara lain kontrol ketat terhadap kebebasan pers dan membuat undang-undang yang melarang adanya aktivitas kelompok-kelompok yang secara politik bertentangan dengannya (Agastya, 2013, hlm. 102). Selain kebijakan tersebut, saluran televisi negara di Libya menyiarkan beberapa tayangan kekejaman yaitu berisi hukuman-hukuman terhadap rakyatnya yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah (Munigar, 2013, hlm 40).

Memang, masyarakat Libya dianggap berpendidikan tinggi dan memiliki standar hidup yang tinggi. Situasi khusus ini menciptakan kontras yang lebih luas antara pendidikan yang baik, tuntutan demokrasi yang tinggi, dan praktik-praktik pemerintah seperti, persepsi korupsi, sistem politik, penyediaan demokrasi (Garland, 2012, hlm. 4). Permasalahan-permasalahan politik yang muncul tersebut nampaknya memberi pengaruh besar pada rasa kekecewaan rakyat yang terbungkam selama kepemimpinan Khadafi. Sehingga pada tahun 2011 yang bertepatan dengan momen *Arab Spring*, menimbulkan aksi demonstrasi dengan skala besar dari rakyat yang menuntut turunnya Khadafi dari pucuk pimpinan Libya.

Peranan Pemuda dan Media Sosial dalam Gerakan Revolusi tahun 2011

Gerakan Rakyat (People Power)

Revolusi yang disebut *The Arab Spring* bermula dari rakyat Tunisia yang berhasil menurunkan rezim Ben Ali. Lalu kemudian meluas ke negara Mesir yang juga berhasil menggulingkan rezim Hosni Mubarak. Revolusi yang melanda kawasan Afrika Utara dalam upaya menentang rezim otoriter tersebut banyak digerakkan oleh pemuda di setiap negara, mereka turun kejalan menyuarakan kritik terhadap rezim penguasa yang otoriter,

korup dan dalam kepemimpinan sering menekan rakyat. Demonstrasi yang berlangsung tentu menghimpun banyak masa dari rakyat yang terdiri dari berbagai golongan, dalam pengorganisasian masa mereka menghimpun mereka dan meminta dukungan melalui media sosial (Agastya, 2013, hlm. 12). Gejolak revolusi tersebut membuktikan bahwa pemimpin-pemimpin yang kuat dan lama memimpin negara dengan kecenderungan otoriter dapat berakhir oleh gerakan perlawanan yang dilakukan rakyat.

Peristiwa *Arab Spring* bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja. Peristiwa ini memiliki latarbelakang kondisi kehidupan sosial politik dan ekonomi yang berlangsung di Negara-negara Arab jauh sebelum gejolak revolusi tersebut terjadi. Kepemimpinan otoriter, satu kekuatan yang mendominasi tanpa ada oposisi, pelanggaran HAM dan krisis ekonomi menjadi faktor pendorong gerakan *Arab Spring*. Perjuangan rakyat dalam revolusi *Arab Spring* menginginkan sistem tatanan hidup yang lebih transparan. Oleh karena itu, lewat demokrasi rakyat bisa mengontrol pemimpinnya dalam kebijakan dan membatasi kekuasaan, serta diharapkan rakyat mendapatkan kebebasan dalam hak politiknya baik berpartisipasi dipilih dan memilih (Sahide, 2015, hlm. 124).

Selain peristiwa *Arab Spring* yang menjadi momentum pendorong gerakan, terdapat juga faktor internal yang menjadi pendorong gerakan. Gerakan rakyat ditunjukkan dengan melakukan aksi protes turun kejalan dengan tujuan untuk menuntut kebebasan kepada rezim Khadafi atas dikekangnya kebebasan berpendapat dan berorganisasi selama Khadafi berkuasa. Rakyat menuntut kebebasan, yaitu kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan dari ketakutan (*freedom of fear*) serta kebebasan dan kesejahteraan yang didapat oleh rakyat Libya dari kemelaratan (*freedom of want*) (Agustina, 2014, hlm. 15).

Gerakan sosial merupakan aksi yang dilakukan individu-individu dalam bentuk

gerakan sosial merupakan suatu upaya untuk memproduksi dan mentransformasi sebuah struktur dan tatanan sosial yang ada. Aksi dalam gerakan sosial ini dapat dilihat sebagai tindakan yang normal menuju pada suatu perubahan yang diharapkan oleh masyarakat. Pendapat tersebut sejalan dengan apa yang terjadi di Libya. Gerakan yang dilakukan masyarakat Libya bertujuan untuk mengubah struktur yang ada secara keseluruhan karena struktur yang ada sudah tidak relevan dan hanya menguntungkan golongan tertentu. Gerakan perlawanan ini dipelopori oleh golongan pemuda dan juga golongan intelektual yang telah memiliki kesadaran tentang demokrasi. Para pelopor gerakan juga berperan sebagai pencerah bagi rakyat yang belum tergugah kesadarannya akan kondisi negara Libya pada saat itu (Rusmanto, 2012, hlm 55).

Aksi protes mulai terjadi pada 15 Februari di kota Benghazi setelah terjadi penangkapan Fathi Tarbil, seorang pengacara HAM yang mewakili beberapa keluarga tahan yang dibunuh di penjara Abu Salim pada tahun 1996. (Vandewalle, 2012, hlm 204). Dalam aksi protes yang melibatkan antara 500 dan 600 demonstran tersebut dibubarkan dengan kekerasan oleh polisi, sehingga mengakibatkan 38 orang luka-luka. Lalu ada aksi penangkapan Novelis Idris Al-Mesmari beberapa jam setelah memberikan wawancara kepada Al Jazeera tentang reaksi polisi terhadap protes. Protes mulai menyebar ke seluruh penjuru wilayah, di Al Bayda dan Zintan ratusan pengunjung rasa menyerukan pembubaran rezim Khadafi (Garland, 2012, hlm. 7).

Gerakan perlawanan ini dipelopori oleh golongan pemuda dan juga golongan intelektual yang telah memiliki kesadaran tentang demokrasi. Para pelopor gerakan juga berperan sebagai pencerah bagi rakyat yang belum tergugah kesadarannya akan kondisi negara Libya pada saat itu. Dari aksi massa tersebut, rakyat yang mendukung pergerakan dengan pendukung Khadafi terutama aparat mengalami bentrok fisik yang menimbulkan

korban jiwa. Revolusi berjalan menyertakan partisipasi berbagai kelompok dengan latar belakang yang berbeda. Tidak heran jika banyak yang mengatakan bahwa *Arab Spring* adalah gerakan yang sepenuhnya sekuler (Yasmine, 2015, hlm. 111).

Aksi yang dilakukan rakyat terus berlanjut sampai pada tanggal 19 Februari 2011 merupakan hari yang menentukan bagi rakyat yang melakukan aksi demonstrasi menentang rezim pemerintah. Bertepatan pada hari minggu, pendukung setia Khadafi serta komandan pasukan Khusus Abdel Fattah Younes mereka berpindah haluan ke arah oposisi, pasukan yang dimiliki berada di Katiba dengan persenjataan lengkap. Itu semua menjadi milik dari oposisi sesuai perintah Younes (Tamburaka, 2011, hlm. 228). Tindakan tersebut menunjukkan bahwa pendukung yang loyal dan militer pun dapat berpaling dari perintah Khadafi. Hal tersebut memberikan gambaran adanya ketidaksepahaman didalam tubuh pemerintah dan militer hingga akhirnya mereka lebih memilih menjadi oposisi dan berjuang bersama rakyat.

Melihat keberhasilan *The Arab Spring* yang terjadi di Tunisia dan Mesir, menjadikan hal tersebut sebagai momentum dan titik puncak rakyat untuk melakukan perlawanan dan melakukan perubahan terhadap rezim Khadafi yang telah memimpin selama 42 tahun. Khadafi berbeda dengan Ben Ali di Tunisia ataupun Mubarak di Mesir yang mudah menyerah ketika rakyat berbalik melakukan perlawanan terhadap Rezim, Khadafi bersikap keras bersikukuh memperjuangkan posisinya hingga titik darah penghabisan.

Penggunaan Media Sosial

Globalisasi membawa pengaruh yang luas pada aspek kehidupan di dunia, Salah satu aspek penting adalah berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi juga bisa dilihat dari lahirnya media sosial sebagai *new media*. Secara teoritik, media sosial adalah salah satu bentuk new

media (media baru). Media baru tidak hanya berperan dalam penyebaran informasi, melainkan juga memungkinkan semua orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara dua arah. Secara umum, terdapat tiga elemen penting dari *new media* yang menyebabkan ia memiliki fungsi sosial, yaitu *communication, convergence, dan content* (3C). Berbeda dari media massa tradisional yang menggunakan hanya "satu bentuk" untuk semua orang, new media bersifat "satu untuk satu" dan konsekuensinya terfragmentasi pada kelompok-kelompok sosial tertentu, yang memiliki akses dan kapabilitas teknologi untuk menggunakannya (Umar dkk. 2014, hlm. 138). Pemberontakan telah dipandang sebagai bagian dari protes Timur Tengah dan Afrika Utara pada tahun 2010 hingga 2011 yang telah mengakibatkan penggulingan pemimpin di Tunisia dan Mesir dengan jangka waktu yang berdekatan dimana peristiwa tersebut diawali protes dan tuntutan yang serupa. Penggunaan media sosial dalam aksi protes massa telah memainkan peran penting dalam mengorganisir oposisi (Garland, 2012, hlm. 4).

Perkembangan media sosial di Afrika Utara dan Timur Tengah menang sangat membantu bagi rakyat di negara-negara kawasan tersebut. Populasi dalam penggunaan media sosial pun sangat tinggi jika di persentasekan dalam jumlah angka rata-rata pengguna terutama pengguna Facebook. Penggunaan media sosial *facebook* di kawasan Afrika Utara dapat dipersentasekan yaitu persentase terbesar pengguna dimiliki oleh Mesir sebesar 44%, diikuti Maroko 23%, Tunisia 20%, Aljazair 11% dan diurutkan paling sedikit pengguna dimiliki Libya 2% (Rauf, 2020, hlm 106). Dari fakta tersebut tergambar bahwa perkembangan teknologi informasi telah berkembang dan dinikmati oleh rakyat di kawasan Afrika Utara. Penggunaan media sosial terutama jejaring sosial facebook di kawasan Afrika Utara, penggunaan internet yang paling tinggi berada di Mesir, diikuti Maroko, Tunisia dan Aljazair sedangkan penggunaan internet paling rendah berada di Libya.

Aksi massa yang dilakukan pada tanggal 17 februari 2011 yang disebut sebagai *Day of rage* terinspirasi oleh revolusi Tunisia dan Mesir dengan membentuk fanpage *facebook* sekaligus menyebarkan informasi melalui jejaring media sosial. Jaringan aktivis internet Libya-Amerika-Inggris-Arab terbentuk dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari lapangan kepada dunia melalui internet (Agastya, 2013, hlm. 110). Selain itu juga media sosial *twitter* digunakan oleh gerakan pemuda Libya (Shabab Libya) dalam melaporkan kejadian aktual di lapangan yang kemudian membagikan kepada dunia untuk menarik simpati dan dukungan massa (*digitaltrends.com*).

Jejaring sosial memiliki sifat yang sulit untuk dikontrol, dapat membantu masifnya gerakan massa yang terjadi di Timur Tengah pada awal tahun 2011 yang lalu gagal dibendung pemerintah. Peranan jejaring sosial bahkan dapat melintasi batas negara, membuat efek domino dari revolusi di sebuah negara yang kemudian menyebar ke negara-negara sekitar (Umar Dkk, 2014, hlm 142). Pada aksi protes menuntut turunnya Khadafi, penggunaan telepon seluler juga berperan penting dalam mengorganisir massa dan bertukar informasi terutama dalam internal masyarakat Libya (Erdag, 2013, hlm 29).

Pengaruh kekuatan internet menadapat sorotan dari Khadafi. Pergerakan dalam media sosial nampaknya memberikan ancaman serius bagi keberlangsungan pemerintahan rezim Khadafi. Tanggal 18 februari 2011, Pemerintah memberikan respon terhadap adanya gerakan internet tersebut adalah dengan menutup semua komunikasi Internet di negara Libya, dan menangkap warga Libya yang telah memberikan wawancara telepon kepada media. Wartawan internasional dilarang oleh pemerintah Libya untuk melaporkan dari Libya kecuali dengan undangan dari pemerintah Khadafi. Wartawan internasional yang berusaha meliput peristiwa itu telah diserang oleh pasukan Khadafi. Khadafi berusaha keras untuk melawan upaya penentangan demonstrasi maupun pergerekan

internet rakyat (Kompas, 19 februari 2011). Wartawan internasional dilarang oleh otoritas Libya untuk melaporkan dari Libya kecuali atas undangan pemerintah Gaddafi (Garland, 2012, hlm 9).

Kekuatan jejaring media sosial dalam menyebarkan semangat revolusi dan menggalang kekuatan hingga keluar negeri membuat rezim khawatir akan mengganggu kestabilan pemerintahan serta kehilangan kekuasaannya. Dengan dalih membuat keteraturan dan keamanan pemerintahan melakukan tindakan balasan atas gerakan media sosial tersebut dengan memadamkan jaringan internet di Libya.

Proses Terjadinya Revolusi Libya Tahun 2011

Revolusi di Libya tahun 2011 memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Ben Ali dan Hosni Mubarak bisa dikatakan menyerah dengan mudah terhadap aksi perlawanan rakyatnya yang menuntut kedua rezim itu untuk mengakhiri pemerintahannya. Namun yang terjadi di Libya tidak demikian, Khadafi bukan Ben Ali ataupun Hosni Mubarak yang turun tanpa perlawanan berarti, Khadafi menentang keras gerakan perlawanan yang dilakukan rakyatnya. Dalam mengatasi pergerakan rakyat yang menuntut perubahan dan turunnya rezim, Khadafi mengerahkan aparat bersenjata dan melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya sendiri.

Aksi protes mulai terjadi di Libya yaitu berawal pada tanggal 15 Februari dimana terjadinya demonstrasi rakyat yang berjumlah sekitar 200 orang bertempat di depan markas polisi kota Benghazi. Masa berdemonstrasi disebabkan penangkapan aktivis HAM yaitu Fathi Terbil. Fathi Terbil merupakan aktivis yang selalu menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat dan terkenal radikal dalam menentang pemerintah yaitu menuntut pergantian pemerintahan yang lebih demokratis dan menginginkan penegakan HAM di Libya. Kemudian jumlah demonstran

terus bertambah hingga terjadinya kekerasan oleh aparat Libya di bawah komando Khadafi. Hal tersebut memicu kemarahan rakyat Libya sehingga menyebabkan terjadinya kerusuhan yang semakin besar. Muammar Khadafi dituntut mundur oleh rakyatnya setelah memimpin selama 42 tahun (Munigar, 2013, hlm 55).

Puncak aksi protes yang menyuarakan revolusi mulai berlangsung setelah terjadinya demonstrasi pada tanggal 17 februari 2011, hari itu di sebut sebagai *Day of rage* atau *Day of revolt* dimana aksi massa yang terinspirasi oleh revolusi Mesir dan Tunisia membentuk fanpage di facebook, sekaligus menyebarkan informasi melalui jejaring media sosial. Hal tersebut memiliki tujuan yaitu mengumpulkan dan menyebarkan informasi dari tempat kejadian kepada seluruh dunia melalui internet. Jaringan aktivis internet Libya-Amerika-Inggris-Arab pun terbentuk. Bentrok terus terjadi antara aparat pendukung pemerintah dan anti pemerintah Khadafi, dalam peristiwa tersebut 20 orang menjadi korban meninggal dunia. Respon yang dilakukan pemerintah dari adanya penyebaran informasi melalui media sosial adalah pemadaman jaringan internet (Agastya, hlm. 110).

Aksi yang dilakukan rakyat terus berlanjut sampai pada tanggal 19 Februari 2011 merupakan hari yang menentukan bagi rakyat yang melakukan aksi demonstrasi menentang rezim pemerintah. Bertepatan pada hari minggu, pendukung setia Khadafi serta komandan pasukan Khusus Abdel Fattah Younes mereka berpindah haluan kearah oposisi, pasukan yang dimiliki berada di Katiba dengan persenjataan lengkap. Itu semua menjadi milik dari oposisi sesuai perintah Younes (Tamburaka, 2011, hlm. 228). Tindakan represif terhadap demonstran hingga menyebabkan jatuhnya korban jiwa nampaknya tidak dibenarkan oleh beberapa orang di dalam tubuh pemerintahan, sehingga mereka yang tidak sepakat dengan tindakan tersebut menyatakan keluar dari pemerintahan. Begitupun dalam tubuh militer, beberapa yang

tidak sepeham mengundurkan diri dan lebih memilih berjuang bersama rakyat sebagai oposisi.

Revolusi yang terjadi Libya berbeda dengan revolusi yang terjadi di Tunisia atau Mesir. Jika di Tunisia dan Mesir, elit militer pada akhirnya bergabung dengan rakyat untuk membantu revolusi, lain halnya yang terjadi di Libya. Situasi di Libya lebih kompleks, sebab meskipun Muammar Khadafi berasal dari militer tidak berarti militer menguasai negara tersebut. Libya didiami oleh berbagai suku dan klan yang berjumlah sekitar 140 dan tidak terlacak dengan jelas, suku-suku inilah yang menjadi kunci utama (Tamburaka, 2012, hlm. 250). Unit Angkatan Darat dan Angkatan Udara yang berbasis di dekat Benghazi dan Tobruk Kufra, Misrata, Pegunungan Barat, dan Zawiyah, militer Libya sebagian besar membelot. (Barany, 2011, hlm 34).

Militer Libya separuhnya bergabung dalam pemberontakan melawan rezim dan banyak sukarelawan telah membentuk pasukan untuk bertahan dari serangan. Di kota Tobruk, sukarelawan mengubah bekas markas besar rezim menjadi pusat untuk membantu pengunjuk rasa (Graland, 2012, hlm. 7). Akibatnya, Dewan lokal dan kelompok – kelompok bersenjata atau milisi muncul secara spontan di seluruh Libya untuk menentang rezim berdasarkan kota-kota. Jaringan solidaritas ini sebagian besar muncul dari kelompok-kelompok yang berdasarkan lokalitas, regionalisme, ideologi, dan suku.

National Transition Council (NTC) sebagai Oposisi

Perlawanan rakyat Libya semakin kuat meskipun mendapat tindakan represif dari pemerintah. Beberapa tokoh melihat perlu adanya penghimpunan bagi rakyat selaku oposisi untuk melakukan perlawanan. Tanggal 24 februari 2011 Mustafa Abdul Jalil seorang mantan menteri kehakiman pada masa pemerintahan Khadafi memimpin sebuah pertemuan yang bertempat di kota Bayda. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 31

perwakilan dari masing-masing daerah di Libya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para politisi, mantan perwira miter, pemimpi suku, akademisi, dan beberapa kalangan pengusaha. Tujuan pertemuan tersebut adalah mencari solusi dari krisis politik yang sedang terjadi di Libya (Tamburaka, 2011, hlm 237).

Oposisi mendirikan *National Transition Council* (NTC) atau Dewan Transisi Pemerintah Libya Sementara, yang berkantor pusat di Benghazi, Libya bagian Timur. Lembaga ini dipimpin oleh Mustafa Abdul Jalil, Mantan Menteri Kehakiman Libya didukung oleh Abdel Fattah Younes sebagai panglima militer oposisi. Mustafa Abdul Jalil mengundurkan diri dari jabatan Menteri Kehakiman Libya dan memutuskan untuk melawan Muammar Khadafi tepat sepekan sebelum dirinya resmi menjadi ketua NTC, yaitu pada 27 Februari 2011. Oposisi beranggotakan rakyat sipil dan militer Libya yang membelot dari pemerintahan rezim Khadafi, awalnya oposisi menguasai Libya bagian Timur dan sebagian Libya Barat setelah bentrok dengan pasukan loyalis (Munigar, 2013, hlm 70).

Adanya NTC sebagai lembaga oposisi segera diakui oleh beberapa negara luar yaitu Prancis, kemudian oleh Inggris Raya, Qatar dan Turki pada Juli 2011 (Vandewalle, hlm 204). NTC muncul sebagai sebuah badan oposisi dan wadah untuk merangkul kekuatan yang kontra dengan Khadafi. Dewan militer daerah terdiri dari milisi-milisi yang mempunyai tanggungjawab keamanan kota menjadi afiliasi, serta NTC menghubungkan tiap kota yang berhasil direbut dari loyalis Khadafi kedalam kendali oposisi. NTC memiliki tujuan yaitu untuk memberikan stabilitas negara yang jelas dan menyediakan beberapa normalitas sebelum pemerintahan baru muncul menggantikan rezim Khadafi (National Libyan Council, 2011).

Keterlibatan PBB dan NATO

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional memiliki peran yang strategis dalam menanggapi krisis di Libya.

Dewan Keamanan PBB sepakat menjatuhkan sanksi terhadap Khadafi. Kesepakatan tersebut merupakan hasil voting yang dilakukan pada tanggal 26 februari 2011. Sanksi yang diberikan Dewan Keamanan PBB, yaitu embargo senjata, pembekuan asset, larangan bepergian bagi Khadafi dan beberapa orang terdekatnya. (Agustina & Machmudi, 2014, hlm. 13). Pada bulan Maret tahun 2011, Dewan Keamanan PBB menetapkan larangan terbang terhadap Libya dan serangan udara untuk melindungi warga sipil, yang kemudian menjadi asumsi dasar NATO untuk terlibat di Libya. Tanggal 19 Maret, NATO mulai membombardir Libya setelah PBB mengenakan sanksi no fly zone terhadap Libya dengan persetujuan 10 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyatakan setuju, sementara 5 negara lain (Rusia, China, Jerman, India, dan Brazil abstain). PBB juga mengeluarkan resolusi *international military action to protect civilian* (Hatimah, 2012, hlm. 69). "No fly zone ditujukan untuk mencegah pesawat tempur pasukan Khadafi melakukan misi pembunuhan dari udara" (Indrawan, 2013, hlm. 129).

Melihat krisis di Libya yang semakin parah karena banyak korban jiwa yang berjatuh akibat tindakan represif pemerintah. Maka dewan keamanan PBB melakukan sidang yang bertujuan mencari solusi untuk menyelesaikan krisis politik yang terjadi di Libya. Hasil dari sidang tersebut yaitu disahkannya Resolusi Dewan keamanan PBB pada tanggal 17 Maret 2011. Pengesahan resolusi tersebut dilakukan setelah mendapat dukungan dari negara anggota Dewan Keamanan PBB yaitu Afrika Selatan, AS, Inggris, Prancis, Portugal, Bosnia, Kolumbia, Nigeria, Gabon dan Herzegovina. Sedangkan lima anggota lain yaitu Jerman, Rusia, Brazil, China, dan India melakukan abstain (Garland, 2012, hlm 70).

Kekuatan eksternal menjadi terlibat dalam konflik di Libya, setelah mereka memiliki legitimasi dari resolusi Dewan Keamanan PBB. Mulai pertengahan Maret 2011, pasukan koalisi yang dipimpin Prancis mulai menerapkan resolusi Dewan

Keamanan PBB. Prancis tidak menunggu untuk memastikan konsensus internasional, dan pasukan koalisi mulai menyerang target rezim Khadafi di Libya. Dengan memegang Konsep 'tanggung jawab untuk melindungi' dan 'kemanusiaan' merupakan dasar legitimasi bagi Kekuatan eksternal yang dipimpin NATO merasa mendapat restu untuk ikut campur di Libya dalam hal hukum internasional. Bentuk intervensi militer ini bertujuan untuk mengakhiri penderitaan manusia yang disebabkan oleh rezim politik dan mencegah kekerasan politik menjadi pembantaian langsung (Erdag, 2017, hlm. 30). Resolusi Dewan Keamanan PBB menjadi dasar legitimasi bagi pasukan NATO untuk masuk kedalam medan tempur di Libya untuk membantu pasukan oposisi. Dukungan yang diberikan oleh NATO terhadap oposisi tentu membawa kekuatan baru terutama alutista serta dukungan kekuatan udara untuk menekan kelompok loyalis Khadafi yang mengalami penurunan kekuatan dan kehilangan kontrol atas kota-kota penting.

Babak akhir revolusi Libya 2011

Konflik bersenjata melibatkan loyalis Muammar Khadafi dan pasukan Koalisi yang masing-masing memiliki kekuatan besar. Pasukan oposisi merupakan milisi-milisi Libya serta NATO yang kekuatannya lebih besar. Loyalis Muammar Khadafi mengandalkan jaringan milisi yang tumpang tindih, menggabungkan aliansi antara suku Qadadfa, Warfalla dan Magharha. Khadafi juga sangat bergantung pada saudara-saudara dekatnya, seperti saudara sepupunya, saudara-saudara Khalifa Hanaish. Lalu Putra bungsunya bernama Khamis, yang dikenal sebagai komandan unit elit yaitu Brigade ke-32 yang membentuk inti dari pengawal Khadafi (Brahimi, 2011, hlm. 614). Keterbatasan jumlah pasukan militer pemerintah untuk menghadapi pemberontak menjadi penyebab Khadafi menggunakan tentara bayaran (*mercenaries*). Tentara bayaran yang berasal dari Chad, diperkirakan tentara berjumlah antara 12.000–18.000 orang milisi

yang sangat setia. Persenjataan yang lengkap diberikan oleh pemerintah kepada tentara bayaran untuk menghadapi pemberontak yang melawan pemerintahan Khadafi (Tamburaka, 2011, hlm 221). Maka dari itu, dalam Revolusi Libya 2011 terjadi berbagai pertempuran yang membawa banyak korban. Pertempuran membela kepentingan masing-masing terus memasuki babak baru, Pasukan Muammar Khadafi terus berjuang membela dan mempertahankan kedaulatan Libya dibawah kepemimpinan Muammar Khadafi.

Pada tanggal 6 Maret 2011, kelompok loyalis Khadafi melakukan serangan balik dan berhasil merebut kembali Lanuf Ra dan Mersa Brega, yang mengakibatkan oposisi terdorong mundur kearah Ajdabiya dan Benghazi. Meskipun kekuatan pasukannya menurun, Khadafi masih tetap memegang kendali atas kota Tripoli, Sirte, Zintan dan Sabha serta beberapa kota lainnya. Pertempuran terus berlanjut, Pada 10 Maret Zawiyah dan Ra's Lanuf direbut kembali oleh pasukan Khadafi. lalu Pada 15 Maret, kota Brega juga telah direbut kembali oleh pasukan Khadafi dan kota pemberontak Ajdabiya yaitu kota terakhir sebelum Benghazi, berhasil dikepung (Garland, 2012, hlm 14).

Secara geografis, pasukan Muammar Khadafi menguasai wilayah Libya bagian Timur yaitu kota Tripoli, sedangkan pasukan oposisi menguasai wilayah Libya bagian Barat seperti Benghazi, Misrata dan Ajdabiya (Munigar, 2013, hlm 67). Beberapa pertempuran hebat terjadi antara loyalis Khadafi dan oposisi yaitu pada 8 Maret 2011 terjadi pertempuran di Kota Zawiyah. Serangan tersebut datang sebagai respon Khadafi ketika pemimpin oposisi Mustafa Abdul Jalil menyatakan bahwa tidak akan mengejar Khadafi asalkan Khadafi bersedia mundur dari jabatannya sejak tenggat waktu 72 jam dari tanggal 7 maret 2011 (Tamburaka, 2011, hlm 260).

Pada tanggal 25 Maret 2011, NATO mengambil kendali operasi perlawanan terhadap pasukan Khadafi di Libya dan menyebutnya sebagai Operasi *Unified Protector* (Operasi Perlindungan Terpadu).

Selain anggota NATO yang ikut terjun dalam operasi, mitra non-NATO juga berkontribusi dalam operasi tersebut seperti Swedia, Qatar, UEA, dan Yordania. Meskipun kontribusi yang diberikan dari mitra non-NATO terbatas seperti bantuan beberapa jet, petugas intelijen dan penghubung (Erdag, 2017, hlm. 32). Bergabungnya beberapa negara Timur Tengah dalam operasi tersebut menunjukkan bahwa komposisi kekuatan eksternal yang terlibat dalam konflik Libya tidak hanya berbasis dari kekuatan barat saja tetapi juga termasuk negara-negara timur.

Hari Minggu 21 Agustus 2011, Tripoli yang merupakan kota penting di Libya dan dianggap sebagai simbol kekuatan rezim Khadafi akhirnya jatuh ketangan pasukan oposisi. Namun perebutan Tripoli belum membuat perang berakhir karena Muammar Khadafi belum tertangkap yang tentunya memastikan bahwa pasukan loyalis Khadafi masih eksis. Setelah berhasil menguasai Tripoli, fokus utama pasukan oposisi adalah mencari keberadaan Muammar Khadafi beserta orang-orang terdekatnya. Oposisi berusaha merebut ketiga kota yang masih dikuasai pasukan loyalis Khadafi, Bani Walid menjadi prioritas kota yang selanjutnya akan direbut Oposisi. Setelah Bani Walid berhasil dikuasai oposisi, pencarian terhadap Muammar Khadafi terus dilakukan, pencarian juga dilakukan terhadap anak-anak serta orang-orang terdekat Khadafi, namun Muammar Khadafi tidak berada di kota tersebut. Untuk tindakan selanjutnya, Interpol menerbitkan surat perintah penangkapan pemimpin Libya, Muammar Khadafi, putranya, Saif al-Islam dan mantan kepala intelijennya, Abdullah al-Senussi. Surat perintah tersebut dikirimkan kepada 118 negara anggota Interpol. Surat itu muncul setelah ada permintaan dari Luis Moreno-ocampo, Jaksa penuntut di Mahkamah Kriminal Internasional atau International Criminal Court (ICC) yang berkantor di Den Haag, Belanda (Kompas. 10 September 2011.hlm. 9).

Kota Sirte merupakan tempat kelahiran Khadafi. Semasa pemerintahan rezim Khadafi,

Sirte dibangun menjadi kota terbesar kedua di Libya. Banyak gedung-gedung megah dibangun di kota ini. Tentara loyalis Khadafi dan para pengikutnya yang masih setia berusaha mempertahankan Sirte yang menjadi kota penting dan wilayah pertahanan bagi pasukan loyalis. Setelah pertempuran panjang, Pada 20 Oktober Sirte akhirnya diambil oleh pemberontak dan Muammar Khadafi terbunuh. (Vandewalle, 2012, hlm 209).

Revolusi Libya 2011 menempuh perjalanan yang panjang jika dibandingkan revolusi yang terjadi di Tunisia dan Mesir. Konflik bersenjata mewarnai proses revolusi yang melibatkan dua kekuatan besar yaitu pasukan oposisi sebagai penggerak perubahan, melawan pasukan loyalis Khadafi yang berupaya mempertahankan kekuasaannya di Libya. Pemerintah oposisi mampu melakukan perlawanan hingga Khadafi akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang di timbulkan oleh gempuran oposisi. Selama 42 tahun Muammar Khadafi menjadi pemimpin di Libya, akhirnya tidak mampu mengendalikan situasi dan kehilangan kendali atas pemerintahan setelah rakyat melakukan revolusi untuk mewujudkan perubahan-perubahan yang sesuai dengan tuntutan rakyat. Tewasnya Muammar Khadafi menandai berakhirnya rezimnya yang telah memimpin Libya selama 42 tahun.

Dampak revolusi terhadap kehidupan sosial dan politik

Dampak terhadap kehidupan sosial

Dampak Sosial dari revolusi Libya adalah keadaan negara yang hancur akibat perang mengakibatkan rakyat Libya kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian. Fasilitas umum penunjang keseharian ikut terkena dampak dari perang saudara yang mengakibatkan tidak berfungsi secara normal. Warga sipil menjadi korban perang, kehilangan anggota keluarga serta kondisi mental rakyat Libya tidak siap menghadapi perang berkepanjangan yang telah mengakibatkan korban jiwa hingga 50.000 orang. Muammar Khadafi tidak memikirkan dampak sosial akibat peperangan yang

melanda negaranya demi mempertahankan kekuasaan dan apa yang dianggapnya sebagai sebuah kehormatan (Munigar, 2013, hlm 83).

Pengungsian menjadi sebuah hambatan untuk membangun kembali kondisi sosial Libya setelah konflik bersenjata. "Pengungsian" dalam hal ini sebutan yang ditujukan bagi pengungsi dan pengungsi yang meninggalkan negara tersebut. Pemulihan nasional di Libya belum terlaksana dengan optimal, sementara bagian integral dari masyarakat Libya tinggal di tenda-tenda pengungsi baik di dalam dan di luar negeri. Pengungsi dari Libya diperkirakan mencapai hampir satu juta jiwa, meskipun perkiraan resmi menunjukkan bahwa banyak pengungsi telah kembali ke Libya (Sharqieh, 2013, Hlm. 19).

Gelombang organisasi masyarakat sipil, termasuk kampanye jaringan sosial dan komunitas. Sebagian besar organisasi masyarakat sipil fokus pada hak asasi manusia, hak-hak perempuan atau masalah kemanusiaan. Schnelzer (2016, hlm. 66) dalam bukunya menjelaskan beberapa organisasi yang tumbuh tersebut yaitu sebagai berikut:

Pertama, *The Libyan Women's Platform for Peace* atau *Platform Perempuan Libya untuk Perdamaian* merupakan salah satu dari organisasi-organisasi yang baru didirikan di Libya. Kontribusi yang telah mereka lakukan adalah mengorganisir protes, mengajukan petisi ke NTC dan GNC, melakukan kontak dengan organisasi internasional, dan memberikan wawancara dengan media. Pengacara hak asasi manusia Salwa Bugaighis juga terlibat dalam *The Libyan Women's Platform for Peace*. Tujuan umum dari organisasi ini adalah berkomitmen untuk mengangkat suara perempuan di Libya dengan memberikan tekanan pada organisasi dan tokoh politik terkemuka.

Kedua, *The Libyan Democratic Gathering* yang didirikan di Tripoli pada 17 September 2011. Organisasi ini merupakan organisasi yang mewadahi atau menanungi berbagai organisasi masyarakat sipil. Anggota yang tergabung dalam organisasi ini termasuk aktivis hak asasi manusia dan aktivis lainnya. Ketiga, adanya

organisasi pemuda yang berkembang meliputi Forum Pemuda Libya, Shabab Libya, serta Gerakan Pemuda Libya.

The Libyan Youth Movement (Gerakan Pemuda Libya) dibentuk selama terjadinya pemberontakan di Mesir pada Januari 2011, dengan tujuan untuk menyatukan pemuda Libya dalam rangka persiapan untuk melakukan pemberontakan di Libya. Mereka mengantisipasi tindakan keras rezim terhadap media dan tindakan represif.

Rakyat Libya terus mengorganisir dengan jaringan suku mereka. Karena pengalaman mereka, para pemimpin suku memainkan peran dominan dalam dewan transisi lokal yang bergabung setelah pemberontakan. Mereka juga berperan dalam mengubah kelompok-kelompok milisi menjadi milisi kesukuan yang disiplin, Kepemimpinan dan pengetahuan mereka juga telah memenangkan posisi penting dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kepentingan lokal dan suku kemungkinan akan terus tampil kuat di Libya di masa depan (*Ministry of Foreign Affairs*, 2014, hlm. 22).

Minority Rights Group International melaporkan bahwa negara menganggap perayaan Tahun Baru *Amazigh* sebagai budaya yang bukan berasal dari Arab, dan sering kali terjadi penganiayaan terhadap orang *Amazigh* yang mengekspresikan budaya dan warisan mereka. Pada saat revolusi, etnis *Amazigh* termasuk yang pertama melakukan protes dan perlawanan terhadap rezim Khadafi pada Februari 2011. Runtuhnya rezim Khadafi menyebabkan peningkatan kesadaran politik dan budaya *Amazigh*. *Amazigh* menganjurkan agar *Tamazight* diadopsi sebagai salah satu bahasa resmi Libya. Konstitusi sementara yang dikeluarkan pada Agustus 2011 hanya secara samar menyinggung budaya dan hak-hak *Amazigh*, dan *Tamazight* tidak diakui sebagai bahasa resmi. Dalam Rancangan konstitusi saat ini bahasa Arab, *Amazigh* dan Tebu dianggap sebagai warisan budaya dan bahasa serta aset bersama bagi semua warga Libya akan tetapi bahasa Arab tetap menjadi bahasa resmi negara (*Ministry of Foreign Affairs*,

2014, hlm 26.) Dengan rancangan tersebut setidaknya etnis *Amazig* (Berber) sebagai kaum minoritas terbesar yang ada di Libya, mendapat pengakuan atas keberadaan mereka sebagai bagian dari masyarakat Libya.

Suku-suku juga memiliki peran yang cukup besar setelah kejatuhan Khadafi tahun 2011. Pemerintahan yang belum stabil dan aspek keamanan yang belum dapat diciptakan selama masa rekonsiliasi membuat rakyat perlu berjuang lebih keras menghadapi perubahan yang terjadi. Rakyat Libya menggunakan jaringan berbasis lokal untuk memastikan keamanan dan kelangsungan hidup mereka. Pada masa-masa ini suku-suku sebagai institusi sosial yang stabil di masyarakat berperan penting yaitu memberikan dukungan, perlindungan dan layanan terhadap rakyat Libya. Tindakan tersebut juga diambil dalam menghadapi fragmaentasi yang terjadi pasca revolusi (Al-Shadeedi & Ezzeddine, 2019, hlm 6).

Empat tahun semenjak kejatuhan Khadafi, milisi sebagai kaum revolusioner menolak untuk dilucuti (*disarmamanet*) dan menjadi bagian dari struktur negara baru negara itu. Perpecahan di antara milisi dan di dalam milisi sendiri mulai muncul. Akibatnya, puluhan milisi di seluruh negeri telah mengklaim otoritas atas tanah mereka (Fraihat, 2016, hlm 26). Lusinan dewan militer di seluruh negeri beroperasi secara independen, tanpa struktur komando yang jelas yang mengaturnya. Hampir setiap kota besar di Libya memiliki dewan militernya sendiri (Fraihat, 2016, hlm. 27).

Selama perang Revolusi, perekonomian terutama produksi minyak mengalami hambatan. Perusahaan minyak nasional Libya mulai beroperasi kembali sejak bulan Januari 2012. Namun, kegiatan produksi minyak tersebut belum bisa berjalan secara optimal karena masih banyak fasilitas-fasilitas perminyakan yang rusak akibat perang. Masalah ekonomi merupakan salah satu pekerjaan terbesar sebuah negara termasuk pemerintahan Libya yang baru. Libya memiliki

sumber yang sangat besar terutama mineral. Perbaikan sektor perekonomian bukan hanya sangat penting bagi kondisi kehidupan dalam negeri, akan tetapi kebijakan bidang ekonomi tersebut akan menentukan hubungan Libya dengan negara-negara lain. Banyak pihak yang menganalisa keberadaan NATO dan AS dalam upaya menjatuhkan rezim otoriter Muammar Khadafi, bukan hanya karena adanya good will untuk membebaskan dan menyelamatkan rakyat Libya dari pemerintah yang buruk, akan tetapi juga karena ada kepentingan terhadap sumberdaya minyak Libya (Agustinova, 2013, hlm. 126).

Dampak terhadap kehidupan politik

Terbunuhnya Muammar Khadafi menandakan berakhirnya rezim tersebut dan kini Libya di pimpin oleh pemerintahan transisi. *National Transition Council* (NTC) sebagai lembaga pemerintahan sementara memberikan perubahan-perubahan dalam upaya mengembalikan kondisi Libya. Bendera Libya yang berwarna polos hijau diubah dengan motif tiga warna dan bulan sabit. Sistem pemerintahan “Jamahiriya” yang dibuat oleh Khadafi dengan ideologi sosialis, diganti dengan sistem republik. Meskipun tengah berada dalam euforia kemenangan atas terlepasnya dari kepemimpinan otoriter, Libya masih perlu melakukan pemulihan secara cepat karena berada dalam kondisi yang rentan (Agustinova, 2013, hlm. 125).

Kemenangan dari pihak oposisi NTC (*National Transition Council*) bukanlah akhir dari perjuangan rakyat Libya untuk mencapai demokrasi, melainkan hanya merupakan tahap awal menuju kehidupan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang diimpikan oleh rakyat Libya perlu menempuh tahapan-tahapn tertentu. Beberapa indikator dalam bidang politik dan pemerintahan yang harus dipenuhi oleh NTC untuk mencapai kestabilan Libya berdasarkan visi Libya yang tertuang dalam “A Vision of A Democratic Libya” yaitu, pelaksanaan pemilu 2012 dengan respon positif. Lalu berhasil melakukan Disarmament, dengan

memberikan konsensus pada para milisi untuk menyerahkan senjata dan mempercayakan tugas mengamankan Libya pada otoritas yang ada. Selain itu, pembentukan konstitusi negara yang baru untuk memulihkan kondisi pemerintahan sebagai dasar politik negara. Pembentukan sistem pemerintahan yang sesuai untuk Libya dengan melihat bagaimana karakteristik masyarakat agar sesuai. Hal tersebut didasarkan mengingat Libya belum pernah memiliki tradisi demokrasi (Agustinova, 2013, hlm. 125).

Pemilu parlemen 7 juli 2012 diikuti oleh banyak partai mulai dari partai besar hingga partai kecil. Hasil dari pelaksanaan pemilu adalah kemenangan partai liberal yang berpartisipasi mendapatkan suara dominan. Partai *National Forces Alliance* (NFA) berhasil memperoleh suara mayoritas dengan 39 kursi. Meskipun menjadi pemenang, NFA tidak meraih mayoritas kursi sehingga harus berkoalisi dengan partai lain atau pihak independen. Partai islam seperti Partai keadilan dan pembangunan atau *Justice and Development Party* (JDP) memperoleh kursi terbanyak kedua yaitu sebanyak 17 kursi, sedangkan partai *Al-Wathan* yang didukung Salafi hanya memperoleh 3,45 persen suara. Partai-partai kecil lainya meraih 24 suara. Terdapat 33 perempuan yang meraih kursi untuk partai, sedangkan untuk independen hanya ada 1 orang yang mendapat kursi (Tempo, 19 Juli 2012).

General National Council sebagai pemerintahan sah menggantikan NTC, melakukan pemilihan untuk posisi perdana menteri Libya yang kosong dan hasilnya adalah Ali Zeidan yang berpartisipasi secara independen, mendapatkan dukungan sebanyak 93 suara dalam parlemen berhasil menjadi perdana menteri baru. Pada masa pemerintahan Khadafi, Ali Zeidan membelot dari rezim dan diasingkan pada tahun 1980. Kemenangan tersebut membuat Ali Zeidan harus mempersiapkan susunan kabinet dalam waktu dekat, karena kondisi di Libya

harus segera dipulihkan termasuk masalah keamanan. Perdana menteri baru tersebut naik ditengah krisis keamanan dan ketertiban negara yang belum sepenuhnya terkendali (BBC, 14 Oktober 2012).

Terdapat beberapa kondisi yang menjadi tugas bagi pemerintahan baru untuk mengembalikan kestabilan Libya. Pasukan milisi memiliki kemampuan militer dan kemampuan operasi yang unggul jika dibandingkan dengan pasukan pemerintah yang belum terlembaga secara utuh. Kondisi demikian memperparah kekacauan dan situasi ketidakamanan di Libya (Erdag, 2017, hlm 50). Jumlah kelompok milisi yang menyebut diri mereka revolusioner *thuwwar*, banyak tersebar lua. Pertumbuhan paling mencolok muncul di daerah dan kota-kota bekas pertempuran seperti Tripoli. Tidak ada perkiraan pasti tentang jumlah milisi di Libya. Crisis Group menghitung bahwa ada antara 100 hingga 300 kelompok milisi bersenjata setelah penggulingan rezim Khadafi, dan bahwa jumlah pejuang pada saat itu diperkirakan mencapai 125.000 orang (*Ministri of Foreigen Affair*, 2014, hlm 7). Fakta tersebut menunjukkan perlunya pembentukan Lembaga keamanan yang kuat guna bertugas dan bertanggungjawab penuh terhadap keamanan Libya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa anggota-anggota GNC membangun sebuah kekuatan aliansi dengan kelompok-kelompok milisi yang ada di Libya. Kekuatan ini memiliki kecenderungan memprioritaskan kepentingan sendiri atau partai dibandingkan kepentingan kolektif dalam parlemen. NFA sebagai salah satu partai besar di Libya membangun afiliasi dengan Dewan Militer *Zintan Revolutioner*, *Brigade Qaaqaa*, dan *Brigade al-Sawaiq*. Partai lain juga ada yang membangun afiliasi dengan milis, Partai Keadilan dan Konstruksi atau *Justice and Develompent Party* (JDP) bergantung pada dukungan milisi Misrata (Schnelzer, 2016, hlm 61). Pembentukan aliansi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh, partai dan milisi membuat sebuah jaringan kekuatan baru yang dapat mengancam kestabilan negara.

Masalah muncul pada tanggal 1 Juni 2013 dimana Libya timur mendeklarasikan pemerintahan sendiri yang terpisah dari pemerintahan pusat. Lebih dari 3.000 anggota Dewan Transisi *Cyrenaica* (CTC) dibentuk sebagai oposisi terhadap pemerintahan menyatakan bahwa *Cyrenaica* adalah daerah otonom di bawah Konstitusi 1951. Pemerintahan baru tersebut diberi nama Barqa atau *Cyrenaica*. Tindakan sepihak Konferensi untuk mendeklarasikan *Cyrenaica* sebagai daerah otonom tidak mendapat dukungan penuh, pemisahan otonom tersebut ditentang oleh brigade revolusioner, Ikhwanul Muslimin dan dewan lokal di *Cyrenaica* (Schnelzer, 2016, hlm 74).

Milisi bahkan menculik Perdana Menteri Ali Zeidan di Tripoli pada tanggal 10 oktober 2013. Perdana menteri Zeidan dibebaskan sembilan jam kemudian namun tidak memberikan rincian tentang penculiknya dan menyerukan kepada masyarakat Libya untuk tetap tenang. Tindakan penculikan tersebut menandakan bahwa terdapat milisi-milisi yang ingin melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Dalam hal ini GNC dan juga otoritas lokal tidak dapat mempertahankan keamanan dalam negeri dan mengamankan perbatasan negara serta fasilitas produksi minyak (Erdag, 2017, hlm 34).

Ali Zeidan telah berulang kali dikritik karena kegagalan pemerintahannya untuk mengatasi ketidakstabilan yang melanda Libya sejak penggulingan diktator Khadafi pada Oktober 2011 (Rahman, 15 Januari 2014). Pada bulan Maret 2014, Perdana Menteri Ali Zeidan dipecat oleh GNC karena kegagalan pemerintahannya untuk menghentikan pemberontak timur yang secara independen melakukan ekspor minyak. Setelah dianggap gagal menangani kestabilan Libya, muncul mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Ali Zeidan. Setelah pemberhentian Zeidan, GNC sementara menunjuk Menteri Pertahanan Abudallah al-Thani untuk menjadi Perdana Menteri sementara yang dilantik sampai

perdana menteri tetap dipilih. Namun baru 6 hari menjabat, al-Thani mengundurkan diri dari jabatannya. Alasan yang membuat al-Thani mundur adalah munculnya teror yang diarahkan kepada dirinya dan keluarganya setelah dilantik menjadi Perdana Menteri sementara (Erdag, 2017, hlm 34).

Kemudian Ahmed Maiteg terpilih sebagai Perdana Menteri. Namun, penjabat ketua GNC, Ezzedine Al-Amawi menyatakan pemilihan Maiteg menjadi Perdana Menteri merupakan sebuah tindakan ilegal. Mahkamah Konstitusi Tertinggi Libya menyatakan bahwa pemilihan Ahmed Maiteg sebagai Perdana Menteri tidak konstitusional (Erdag, 2017, hlm 35).

Terbentuknya GNC (*General National Congress*) sebagai bukti keberadaan pemerintah Libya yang merupakan langkah awal dalam proses pemulihan dari kondisi pemerintahan rezim sebelumnya. Konflik antara kubu Islamis yang mendominasi GNC dan militer serta gerakan milisi bersenjata di berbagai daerah turut serta dalam mengganggu keamanan di wilayah Libya. Sebelumnya militer yang dipimpin Khalifa Haftar bermaksud membubarkan GNC dan membentuk pemerintahan sementara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Pemerintahan yang telah terbentuk dianggap tidak memberikan perubahan bagi kubu militer Libya karena GNC dituduh lebih memilih untuk mempersenjatai kelompok-kelompok milisi Islamis daripada memperbarui alutsista, meningkatkan kualitas militer dan meningkatkan kesejahteraan tentara (Ghafur, 2014, hlm 97).

Konflik antara kubu Islamis yang mendominasi GNC dan militer serta gerakan milisi bersenjata di berbagai daerah turut mewarnai instabilitas di Negara Libya. Sebelumnya militer yang dipimpin Khalifa Haftar bermaksud membubarkan GNC dan membentuk pemerintahan sementara yang bertugas menyelenggarakan Pemilu. Dengan dalih menumpas milisi Islamis yang didukung parlemen Libya dan mendesak Mahkamah Agung untuk membentuk dewan sipil yang

dapat mengawasi penunjukan kabinet darurat dan menggelar pemilu baru. (Saputri, 22 Mei 2014).

Jenderal Khalifah Haftar melakukan pergerakan dengan dalih menumpas milisi Islamis yang didukung parlemen Libya dan mendesak Mahkamah Agung untuk membentuk dewan sipil yang dapat mengawasi penunjukan kabinet darurat dan menggelar pemilu baru. Pada 16 Mei 2014, Jenderal Khalifa Haftar, memimpin Tentara Nasional Libya, melancarkan serangan udara yang disebut Operasi Karama (Martabat) terhadap kelompok-kelompok bersenjata radikal yang ada di Libya (Erdag, 2017, hlm 35).

Jenderal Haftar yang meluncurkan kampanye militer besar-besaran melawan Islamis sehingga mengakibatkan konflik bersenjata yang berlangsung hingga hari ini. Dalam sebuah wawancara dengan *Washington Post*, ia memilih penggambaran untuk serangannya terhadap pasukan Islam di Benghazi yang cocok digambarkan seperti dengan perang Amerika melawan terorisme (Schnelzer, 2016, hlm 58).

Meskipun terdapat dinamika yang terjadi dalam tubuh pemerintahan gelarung Pemilu tetap dilaksanakan pada 25 juni 2014. Namun antusias rakyat dalam menyambut pemilu nampaknya mengalami penurunan dibandingkan pemilihan anggota parlemen pada tahun 2012. Dalam pemilu bebas pertama yang digelar Libya pada 2012 lalu, sebanyak 2,8 juta warga terdaftar mengikuti pemilihan, namun pada pemilihan parlemen kedua jumlah pemilih terdaftar hanya mencapai 1,5 juta. Menurut hasil yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Nasional Tinggi Libya, hanya 188 dari 200 kursi di parlemen baru yang bisa diselesaikan. Hal ini disebabkan oleh boikot dan penundaan pemilihan karena alasan keamanan di beberapa daerah pemilihan. (Erdag, 2017, hlm 36).

Kestabilan politik nampaknya masih belum tercipta hingga tahun 2014. Perubahan-perubahna yang terjadi dalam pemerintahan

nampaknya belum dapat mencapai sebuah persatuan nasional secara penuh oleh tokoh-tokoh berpengaruh Libya. Kondisi kehidupan sosial politik Libya setelah kejatuhan rezim Muammar Khadafi tepatnya sejak tahun 2011 telah mengakibatkan banyak perubahan termasuk instabilitas politik di negara tersebut. Kehidupan sosial yang belum kembali normal, perekonomian belum kembali stabil, militer yang lemah dan yang lebih penting tidak ada solidaritas bersama dalam unsur-unsur kekuatan politik. Partai, suku, dan organisasi masyarakat memiliki visi masing-masing yang bertentangan. Kondisi perpecahan antara HoR dengan GNC yang didominasi politikus muslim membuat masalah baru dalam pemerintahan Libya.

SIMPULAN

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi kehidupan sosial dan politik seperti: yang tidak kunjung mendapat perbaikan menimbulkan rasa kekecewaan dan menjadi pendorong keinginan rakyat Libya untuk melakukan perubahan. Peranan pemuda dan media sosial sangat efektif dalam mewujudkan gerakan revolusi yang bertujuan mengganti pemerintahan rezim Khadafi dengan pemerintahan baru. Konflik bersenjata mewarnai proses revolusi yang terjadi di Libya pada tahun 2011. Kepentingan yang berbeda dan pilihan menggunakan kekerasan menjadi sebab utama terjadi perang saudara.

Peristiwa revolusi tersebut tentunya sangat berpengaruh besar bagi masa depan Libya. Perubahan-perubahan yang merupakan dampak dari revolusi mulai dirasakan rakyat seperti kebebasan berpendapat dan berpolitik. Namun meskipun rezim baru telah berkuasa menggantikan rezim Khadafi, terdapat masalah-masalah baru yang menjadi hambatan dalam mewujudkan pemulihan Libya pasca revolusi. Keamanan dan krisis persatuan menjadi masalah utama bagi Libya untuk melakukan proses pemulihan negara.

REFERENSI

- Agastya, M. (2013). *Arab spring: badai revolusi timur tengah yang penuh darah*. Diva Press.
- Agustina, E., & Machmudi, Y. (2014). *Kekuasaan Muammar Qaddafi di Libya (1969–2011) [Skripsi, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia]*. <http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2016/S56287-Elia>
- Agustinova, D. E. (2013). Latar belakang dan masa depan Libya pasca Arab Spring. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(2), 120–128.
- Al-Shadeedi, A. H., & Ezzeddine, N. (2019). *Libyan tribes in the shadows of war and peace*. Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Arampatzi, E., Burger, M., Ianchovichina, E., Röhricht, T., & Veenhoven, R. (2018). Unhappy development: Dissatisfaction with life on the eve of the Arab Spring. *Review of Income and Wealth*, 64(S1), S80–S113. <https://doi.org/10.1111/roiw.12318>
- Arayssi, M., Fakhri, A., & Haimoun, N. (2019). Did the Arab Spring reduce MENA countries' growth? *Applied Economics Letters*, 26(19), 1579–1585. <https://doi.org/10.1080/13504851.2019.1602490>
- Bachri, D. A., Hasan, S. H., & Mulyana, A. (2023). Perang Dunia II: Strategi perang darat Jepang. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(2), 157–166. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i2.45861>
- Barany, Z. (2011). The role of the military. *Journal of Democracy*, 22(4), 24–35. <https://doi.org/10.1353/jod.2011.0041>
- Bayat, A. (2020). *Revolution without revolutionaries: Making sense of the Arab Spring*. Stanford University Press.
- BBC. (2012, October 14). *Ali Zidan elected Libya's new prime minister*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-africa-19943593>
- Brahimi, A. (2011). Libya's revolution. *The Journal of North African Studies*, 16(4), 423–438. <https://doi.org/10.1080/13629387.2011.632672>
- Erdag, R. (2017). *Libya in the Arab Spring: From revolution to insecurity*. Springer.
- Fraihat, I. (2016). *Unfinished revolution: Yemen, Libya, and Tunisia after Arab Spring*. Yale University Press.
- Garland, L. (2012). *2011 Libyan civil war*. White Word Production.
- Grinin, L., & Korotayev, A. (2022). The Arab Spring: Causes, conditions, and driving forces. In *Handbook of revolutions in the 21st century: The new waves of revolutions, and the causes and effects of disruptive political change* (pp. 595–624). Springer International Publishing.
- Hatimah, A. H. (2012). Masa depan Libya pasca pemerintahan Moammar Khadafy [Skripsi tidak dipublikasikan]. Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.
- Hodler, R. (2018). The political economics of the Arab Spring. *Economic Inquiry*, 56(2), 821–836. <https://doi.org/10.1111/ecin.12612>
- Ismaun, W., Murdiah, M., & Darmawan, W. (2016). *Pengantar ilmu sejarah*. Asosiasi Pendidik dan Peneliti Sejarah.
- Kartini, I., Djafar, Z., Basyar, M. H., Mashad, D., & Gafur, M. F. (2016). *Agama dan demokrasi: Munculnya kekuatan politik Islam di Tunisia, Mesir dan Libya*. Pustaka Jaya.
- Kompas. (2011, September 10). *Interpol memburu Khadafy*. Kompas. <http://amp.kompas.com/edukasi/read/2011/09/10/04303787/interpol.memburu.khadafi>
- Ministry of Foreign Affairs. (2014, December 19). *Libya: Militias, tribes, and Islamists*. <http://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Libya-Militias-Tribes-and-Islamist-19122014.pdf>
- Munigar, P. (2013). *Muammar Khadafy: Kajian tentang kepemimpinan di Libya (1969–2011) [Skripsi tidak dipublikasikan]*. Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta.

- Nazir, N. R. (2008). *Sosiologi: Kajian lengkap konsep dan teori sosiologi sebagai ilmu sosial*. Widya Padjajaran.
- Putra, F., et al. (2006). *Gerakan sosial*. Averrors Press.
- Rauf, H. M. (2020). Arab Spring: Gejolak revolusi di kawasan Afrika bagian utara tahun 2010–2011 [Skripsi tidak dipublikasikan]. Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rusmanto, J. (2012). *Gerakan sosial: Sejarah perkembangan teori antara kekuatan dan kelemahannya*. Zifatama Publishing.
- Sahide, A. (2015). The Arab Spring: Membaca kronologi dan faktor penyebabnya. *Jurnal Hubungan Internasional*, 4(2), 15–29.
- Salam, E. A. A. (2015). The Arab Spring: Its origins, evolution and consequences... four years on. *Intellectual Discourse*, 23(1), 89–101.
- Schnelzer, N. (2016). *Libya in the Arab Spring: The constitutional discourse since the fall of Gaddafi*. Springer VS.
- Setiadi, E. M., & Kolip, U. (2013). *Pengantar sosiologi: Pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial*. Kencana.
- Sharqieh, I. (2013). *Libya national reconciliation*. Brookings Institution.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Soffiantini, G. (2020). *Food insecurity and political instability during the Arab Spring*. *Global Food Security*, 26, 100400. <https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100400>
- Tamburaka, A. (2011). *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan para penguasa otoriter di negara-negara Timur Tengah*. Narasi.
- Tempo. (2012, July 19). *Aliansi Liberal resmi menangkan pemilihan Libya*. Tempo. <http://dunia.tempo.com/amp/417904/aliansi-liberal-resmi-menangkan-pemilihan-libya>
- Umar, A. R. M., et al. (2014). Media sosial dan revolusi politik: Memahami kembali fenomena “Arab Spring” dalam perspektif ruang publik transnasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 1–15. <https://doi.org/10.17509/jisip.v18i2.1591>
- Vandewalle, D. (2012). *A history of modern Libya*. Cambridge University Press.
- Yasmine, S. E. (2015). Arab Spring: Islam dalam gerakan sosial dan demokrasi Timur Tengah. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 28(2), 175–189. <https://doi.org/10.22146/jmkp.22384>